



Basuki Tak Terima Dinilai Buruk oleh BPK

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak terima laporan keuangan DKI tahun lalu diberi predikat wajar dengan pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut dia, banyak daerah yang pengelolaan anggarannya tak lebih baik dari DKI justru memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian.

Basuki heran terhadap

hasil pemeriksaan BPK karena ada beberapa proyek yang justru merugikan keuangan daerah malah tak dicatat sebagai temuan mencurigakan. "Saya sudah tahu alasannya. Karena proyek itu lewat proses lelang, jadi dianggap beres," kata dia di Balai Kota, kemarin.

Salah satu hasil pemeriksaan BPK yang dinilai aneh, menurut Basuki, adalah pembelian lahan untuk

Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat, yang disebut kemahalan, yakni Rp 191 miliar. Padahal, pemerintah DKI membeli dengan harga sesuai dengan nilai jual obyek pajak. Sedangkan BPK menghendaki pembelian lahan itu dengan model taksiran harga. "Prosedur pembelian itu yang dianggap sebagai temuan oleh BPK."

Menurut Basuki, penilai-

an BPK tak adil. Sebab, tak ada standar yang jelas dari lembaga tersebut dalam menerapkan proses audit anggaran. "Daerah yang dapat predikat WTP itu banyak bupati dan gubernurnya masuk penjara."

BPK menyatakan ada 70 temuan dalam laporan keuangan DKI yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin lalu. Temuan dana Rp

2,16 triliun itu terdiri atas program yang berindikasi memunculkan kerugian daerah hingga Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebesar Rp 1,7 triliun. Juga ditemukan kekurangan penerimaan daerah Rp 3,2 miliar, belanja administrasi Rp 469 juta, dan pemborosan Rp 3 miliar.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz

menanggapi santai kritik Gubernur Basuki. "Standar mengaudit keuangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat sama, tidak dibedakan karena keuangan negara," ujar dia. Ia juga menantang Basuki untuk membeberkan data yang terkait dengan status keuangan WTP bagi daerah yang pemimpinnya terjerat kasus korupsi.

● RAYMUNDUS RIKANGJ DIMAS SIREGAR